

MODEL PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL DALAM UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI PEDESAAN DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROPINSI RIAU¹

Almasdi Syahza²
Lembaga Penelitian Universitas Riau, Pekanbaru. 28293

Pendahuluan

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai *nation state*, sejarah sebuah negara yang salah memandang dan mengurus kemiskinan. Dalam negara yang salah urus, tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Kemiskinan, menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup (*safety life*), mempertaruhkan tenaga fisik untuk memproduksi keuntungan bagi tengkulak lokal dan menerima upah yang tidak sepadan dengan biaya tenaga yang dikeluarkan. Para buruh tani desa bekerja sepanjang hari, tetapi mereka menerima upah yang sangat sedikit (James. C.Scott, dalam Gregorius Sahdan 2005). Kemiskinan menyebabkan keterbelakangan penduduk dan termarginalkan kehidupan mereka. Mereka tidak punya akses baik akses pengembangan ekonomi maupun akses terhadap kebijakan. Mereka menerima apa adanya. Dampak ini menyebabkan daerah mereka merasa terabaikan dan terisolir. Ketimpangan pembangunan muncul dan berdampak terhadap semakin tertinggalnya perkampungan miskin tersebut.

Salah satu kabupaten yang merasakan ketimpangan dan banyaknya daerah tertinggal di Propinsi Riau adalah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kabupaten tersebut merupakan pemekaran dari kabupaten induk yakni

¹ Hasil penelitian Hibah Fundamental, DP2M Dikti Tahun 2012

² Staf Pengajar dan Peneliti Senior Ekonomi Pedesaan, Lembaga Penelitian Universitas Riau

Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu kabupaten otonomi baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki 5 (lima) kecamatan dengan luas daerah 3.707.84 km². Jumlah penduduk sebanyak 216.329 jiwa. Untuk lebih jelasnya luas daerah dan jumlah penduduk berdasarkan kecamatan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Daerah dan Jumlah Penduduk kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2010

No	Kecamatan	Luas Darah			Jumlah Penduduk	
		Km ²	Ha	%	Jiwa	%
1	Tebing Tinggi	849,50	84.950	22,91	85.742	39,64
2	Tebing Tinggi Barat	587,33	58.733	15,84	16.113	7,45
3	Rangsang	680,50	68.050	18,35	31.060	14,36
4	Rangsang Barat	241,60	24.160	6,52	34.370	15,89
5	Merbau	1.348,91	134.891	36,38	49.044	22,67
Jumlah		3.707,84	370.784	100,00	216.329	100,00

Catatan: Data sebelum pemekaran kecamatan

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, 2011

Daerah ini merupakan daerah yang terdiri dari empat gugus pulau besar, dan merupakan salah satu kabupaten kepulauan yang ada di Provinsi Riau. Bila ditinjau dari geografis, Kabupaten Kepulauan Meranti berada di jalur pelayaran dan perdagangan internasional Selat Malaka dan dua Negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura. Hal ini tentunya dapat dijadikan peluang bagi pengembangan potensi ekonomi di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kabupaten Kepulauan Meranti juga berdekatan dengan pengembangan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 dan bahagian yang tidak terpisahkan dari *Free Trade Zone* Batam, Bintan dan Karimun (FTZ-BBK). Batam sebagai *Free Trade Zone* (FTZ) yang sebelumnya telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), berubah menjadi suatu usaha untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga

keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional yang dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu (Rusli Zainal, 2010).

Kedudukan strategis Kabupaten Kepulauan Meranti yang berdekatan dengan Batam sebagai FTZ terhadap Singapura akan memberikan berbagai peluang pengembangan kawasan *hinterland* Batam, melalui penetapan peran sinergis terhadap pengembangan aktifitas ekonomi dan sosial, baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Kawasan hinterland Batam (dalam hal ini wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti) dapat memainkan peranannya sebagai *extension activity and buffer area*. Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu *hinterland* Batam dapat menjadi *key success factor dan stimulator* bagi penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Batam Bintan dan Karimum (KEK-BBK). Disamping itu dapat pula mentransformasi diri agar memiliki daya saing dalam menangkap berbagai peluang ekonomi KEK-BBK. Pengembangan kawasan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mendukung KEK-BBK harus dicermati sejak dini agar berbagai konsep pengembangan wilayah di Kabupaten Kepulauan Meranti benar-benar fokus dan terstruktur dengan baik.

Dalam upaya menciptakan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai *hinterland* KEK Batam, diperlukan arah pengembangan antara lain memperkuat fungsi Kabupaten Kepulauan Meranti di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, infra struktur, peningkatan sumber daya manusia tempatan, pariwisata, yang kesemuanya itu tentunya haruslah sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Meranti itu sendiri.

Tantangan yang dihadapi oleh daerah otonom yang baru khususnya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah peningkatan pembangunan daerah dan kemandirian dalam pembangunan dengan kendala ketersediaan sumberdaya di daerah. Dengan demikian penentuan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi yang tepat sangat diperlukan. Arah penentuan kebijakan strategi tersebut adalah tercapainya kriteria-kriteria prioritas pembangunan berupa penurunan bentuk-bentuk ketimpangan, kebijakan yang sesuai dengan

keinginan masyarakat dan pembangunan yang mampu meningkatkan pertumbuhan daerah. Sedangkan harapan dari pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Dalam kaitan tersebut, salah satu langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat dan terarah (Syamsuar, 2010)

Berdasarkan data dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (2011) di daerah tersebut terdapat 73 desa (Tabel 2). Sebagian besar dari desa yang ada yakni sebanyak 59 desa (80,82%) merupakan desa tertinggal. Jumlah rumah tangga sebanyak 45.564 KK, dan sebesar 34,84% (15.876 KK) merupakan rumah tangga miskin. Banyaknya desa tertinggal dan keluarga prasejahtera di daerah ini merupakan indikasi bahwa pembangunan ekonomi selama ini (semasa bergabung dengan kabupaten induk) belum menyentuh rakyat lapisan bawah sehingga dengan adanya krisis menyebabkan daerah-daerah pedesaan yang terpencil menjadi rentan sehingga terpuruk menjadi daerah miskin. Hal ini disebabkan selain oleh karena kebijaksanaan yang salah dan distortif pada masa lalu juga karena kondisi wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan wilayah pesisir.

Tabel 2. Jumlah Rumah Tangga, Desa, Rumah Tangga Miskin, dan Desa Tertinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2010

No	Kecamatan	Rumah Tangga	Jumlah Desa	Rumah tangga Miskin		Desa Tertinggal	
				Miskin	%	Desa	%
1	Tebing Tinggi	17.745	16	4.953	27,91	10	62,50
2	Tebing Tinggi Barat	3.585	8	1.598	44,57	6	75,00
3	Rangsang	6.729	13	2.843	42,25	11	84,62
4	Rangsang Barat	6.608	15	2.307	34,91	14	93,33
5	Merbau	10.897	21	4.175	38,31	18	85,71
Jumlah		45.564	73	15.876	34,84	59	80,82

Catatan: Data sebelum pemekaran kecamatan

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, 2011

Tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai daerah otonom baru adalah peningkatan pembangunan daerah dan kemandirian dalam pembangunan tersebut. Pelaksana kebijakan di daerah harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang

merata dan berimbang di setiap kecamatan. Dengan kondisi dan potensi yang ada, maka diperlukan suatu kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan dan percepatan ekonomi di Kabupaten kepulauan Meranti dengan tingkat kesejangan yang minimal.

Posisi Kabupaten Kepulauan Meranti yang sangat menguntungkan dari segi *hinterland* KEK Batam, maka ketimpangan dan kesenjangan ekonomi di daerah dapat di kurangi dengan memacu pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan potensi yang ada. Salah satu cara untuk mengatasi kesenjangan ini adalah dengan program pembangunan ekonomi untuk memberdayakan masyarakat pedesaan. Sesuai dengan ketersediaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang ada di pedesaan maka program pembangunan ekonomi yang cocok adalah pembangunan ekonomi yang berbasis sumberdaya pertanian pedesaan dan tidak membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan tinggi. Program ini dapat berbentuk pembangunan pertanian tanaman perkebunan, tanaman makanan dan hortikultura serta perikanan.

Dari uraian yang dikemukakan, maka penelitian ini diharapkan dapat menemukan model pengembangan daerah tertinggal dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi pedesaan di Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam upaya membangun kabupaten yang mandiri.

Berkaitan dengan penelitian ini, beberapa pertanyaan berikut dapat dijadikan acuan dalam menyusun perumusan model pengembangan daerah tertinggal dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi pedesaan di Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau, yaitu: 1) Seberapa besar potensi sektor ekonomi untuk dikembangkan dalam hal perwilayahan pengembangan potensi ekonomi berbasis agribisnis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan Kabupaten Kepulauan Meranti; 2) Seberapa besar potensi perekonomian daerah, yang terkait dengan struktur ekonomi, potensi sumberdaya, perkembangan dan keterkaitan sektoral yang berpengaruh dalam pengetasan kemiskinan di daerah pedesaan; 3) Bagaimanakah perumusan

model pengembangan daerah tertinggal dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi pedesaan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menyusun rencana strategis model pengembangan daerah tertinggal dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi pedesaan di Kabupaten Kepulauan Meranti, dan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menentukan strategi percepatan pembangunan ekonomi masyarakat di pedesaan melalui pemanfaatan potensi sektor ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Kabupaten Kepulauan Meranti; 2) Menentukan potensi perekonomian daerah, yang menyangkut struktur ekonomi, potensi sumberdaya, perkembangan dan keterkaitan sektoral yang berpengaruh dalam pengetasan kemiskinan di daerah pedesaan yang berbasis agribisnis; 3) Menentukan perumusan model pengembangan daerah tertinggal dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi pedesaan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Implementasi dan Pembahasan

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara, diperlukan langkah-langkah strategis dan komprehensif. Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan (TNP2K, 2012). Apabila dikaitkan dengan kondisi kemiskinan salah satu kabupaten di Propinsi Riau yang tingkat kemiskinannya termasuk tinggi adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Keadaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti jauh tertinggal dibandingkan dengan keadaan ekonomi daerah lain di Propinsi Riau. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten yang tingkat kemiskinannya sangat tinggi. Dari data yang ada diperoleh informasi jumlah rumah tangga miskin sebanyak 25.863 rumah tangga (RT) yang terdiri dari 114.496 jiwa. Jumlah anak yang bersekolah sebanyak 23.461 anak (berdasarkan Usia 7 s/d 18 th) dan jumlah anak tidak sekolah 7.474 anak. Dari sisi pekerjaan sebanyak 49.070 jiwa bekerja (usia produktif L/P), tidak bekerja (pada usia produktif L/P) sebanyak 23.621 jiwa.

Terkait dengan lapangan usaha, jumlah kepala rumah tangga yang bekerja 23.322 KRT (terbagi dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri pengolahan, pertambangan, bangunan, perdagangan, jasa, dan lain sebagainya). Jumlah individu yang berkerja 48.753 (terbagi dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri pengolahan, pertambangan, bangunan, perdagangan, jasa, dan lain sebagainya).

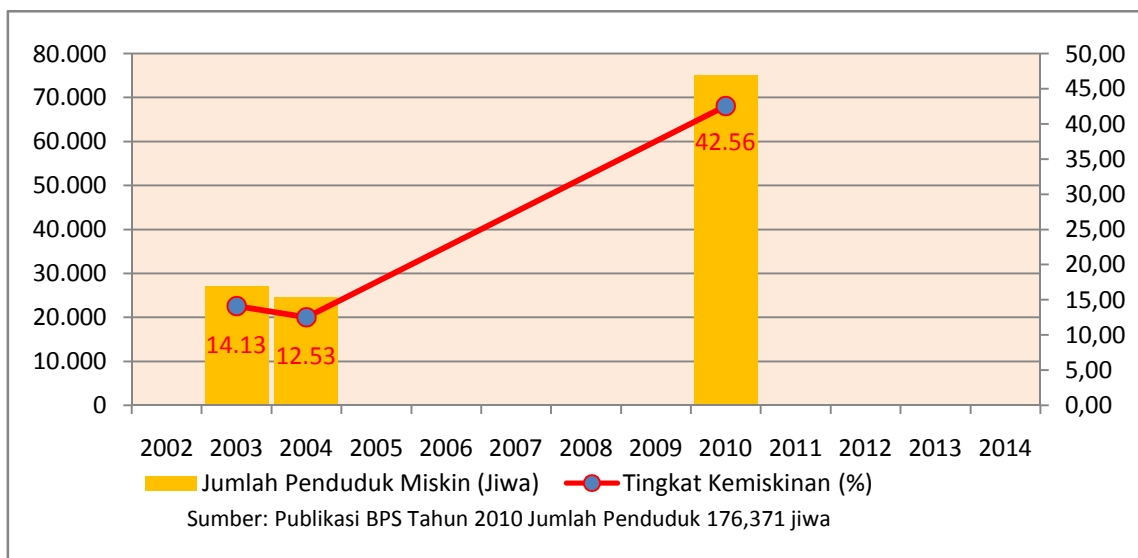
Pelaksanaan pembangunan di Kabupaen Kepulauan Meranti termasuk agak rumit bila dibandingkan dengan pembangunan ekonomi daerah lain di Propinsi Riau. Kondisi ini disebabkan karena adanya kendala yang dihadapi di daerah, antara lain: 1) kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau; 2) angka kemiskinan masih relatif tinggi; 3) terbatasnya infrastruktur; 4) rendahnya kualitas SDM; dan 5) degradasi lingkungan hidup.

1. Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari kabupaten induk yakni Kabupaten Bengkalis. Sebagai kabupaten yang baru dimekarkan masih banyak tugas pemerintah daerah untuk membangun kabupaten tersebut, terutama untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Faktor utama yang dihapapi oleh pemerintah daerah yang baru mekar terutama Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sumber dana untuk pembangunan. Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk daerah yang sumber pendapatan daerahnya (PAD) termasuk rendah. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kendala dalam pembangunan terutama memacu pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di

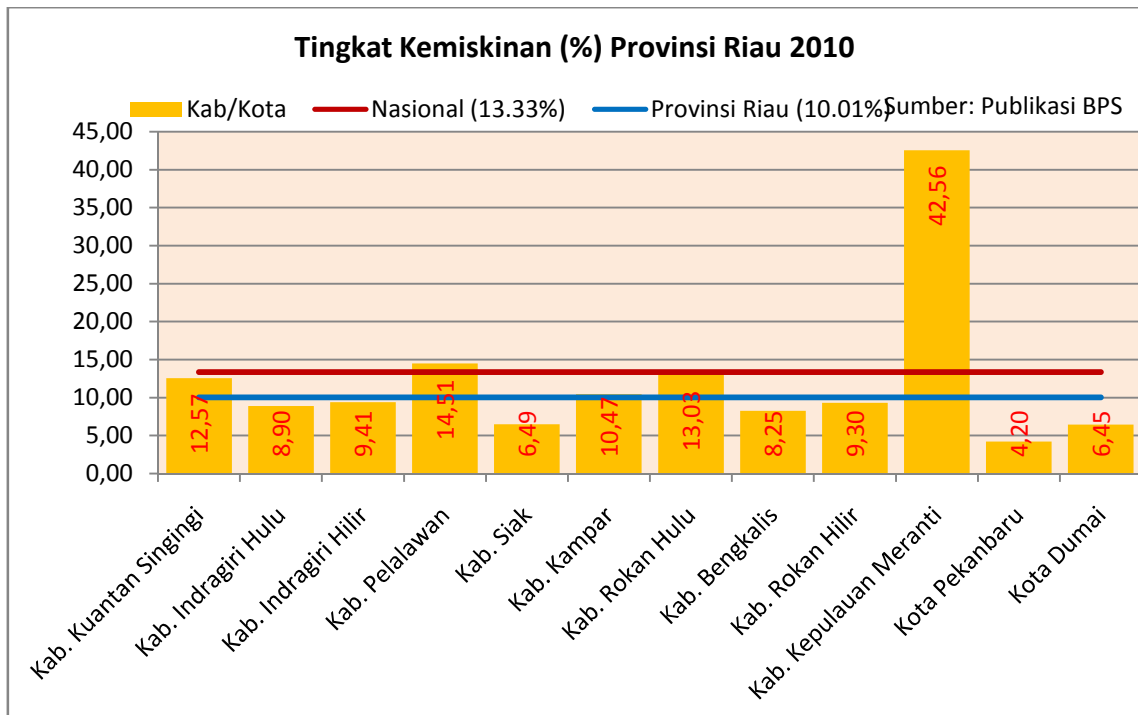
Kabupaten Kepulauan Meranti diperlukan anggaran pembangunan terutama untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan dan pelabuhan.

Sesuai dengan kondisi daerahnya, Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah kepulauan yang berada di wilayah pesisir Propinsi Riau. Faktor geografi tersebut menjadi kesulitan utama dalam pembangunan, karena membutuhkan dana yang besar untuk membangun infrastruktur. Berdasarkan hasil kajian di lapangan, dapat diketahui dan diidentifikasi angka kemiskinan serta permasalahan pembanguana di Kabupaten Kepulauan Meranti. Angka Kemiskinan dan Issue Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti, antara lain: 1) angka kemiskinan relatif tinggi (42,5%), atau 75.000 jiwa; 2) infrastruktur dasar belum memadai (rumah tidak layak huni, jalan, abrasi, air bersih, banjir, pelabuhan, listrik); 3) masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, (masih banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah atau tidak melanjutkan pendidikan); 4) fasilitas serta sarana dan prasarana pendidikan yang relatif masih terbatas; 5) angka kematian ibu dan bayi yang relatif masih tinggi (sarana dan prasarana Kesehatan masih belum memadai); 6) penangkapan ikan masih menggunakan alat tradisional; 7) perkebunan karet milik masyarakat yang sudah tua, sehingga diperlukan proses revitalisasi untuk meningkatkan hasil produksi perkebunan. Pada Gambar 1 disajikan keadaan penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Meranti.



Gambar 1. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2002-2010

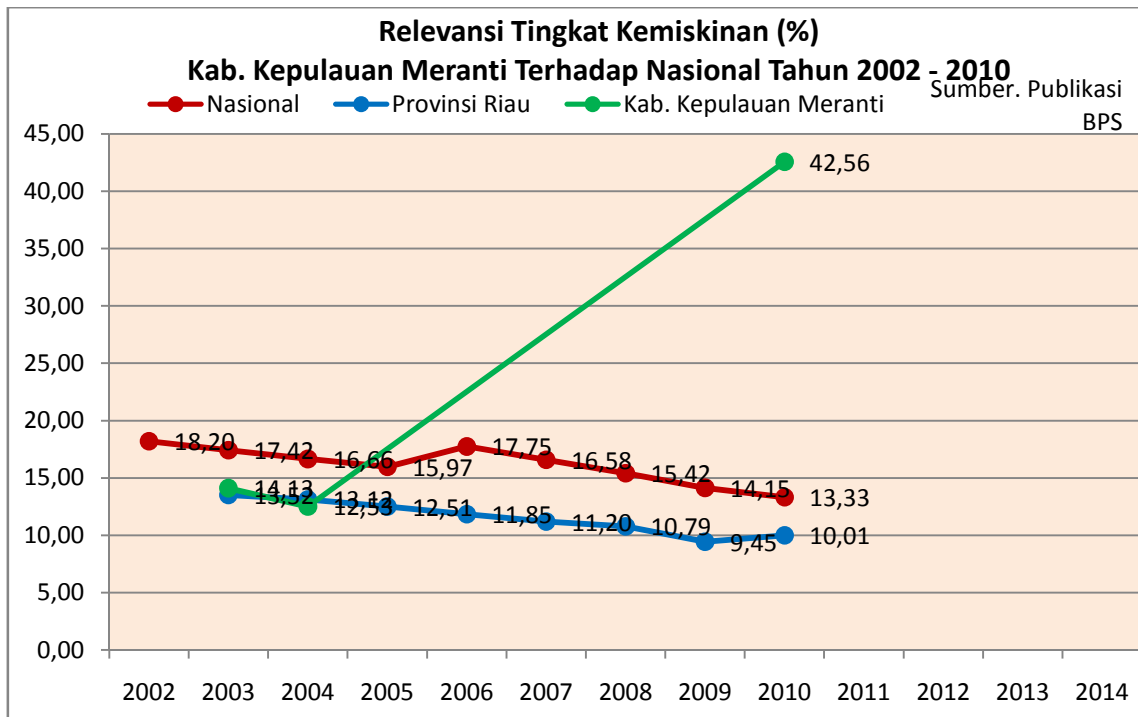
Gambaran perbandingan kemiskinan di Daerah Riau berdasarkan kabupaten/ kota disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Perbandingan Tingkat Kemiskinan (%) antar Kabupaten di Provinsi Riau 2010

Parameter yang lazim digunakan para analis dalam menetapkan jumlah kemiskinan adalah lebih cenderung pada pendekatan pemenuhan kebutuhan pokok. Seseorang dikatakan miskin manakala dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya yakni makanan, asupan kalorinya minimal 2.100 kkal/hari per kapita. Kemiskinan juga diukur dengan menambahkan parameter pemenuhan kebutuhan pokok/dasar non makanan yang meliputi pendidikan, sandang dan hal-hal lainnya. Dalam menentukan kemiskinan terdapat variabel pokok yang tidak bisa dilupakan yakni yang terkenal dengan istilah garis kemiskinan (GK). Garis kemiskinan ini terbagi menjadi dua yakni garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GKBM). Adapun komponen dari masing-masing indikator adalah GKM lebih berbasis pada pendekatan pemenuhan asupan kalori sebesar 2.100 kkal/hari per kapita (Muhammad Ahmbali, 2008). Komponen GKBM adalah seperti pendidikan, kesehatan, komunikasi, rekreasi, transportasi, listrik, dan asuransi.

Relevansi Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Kepulauan Meranti Terhadap Nasional Tahun 2002-2010 disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Relevansi Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Kepulauan Meranti Terhadap Nasional Tahun 2002-2010

Untuk penanggulangi kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti, prioritas program pengembangan difokuskan di daerah yang berpotensi untuk dikembangkan atau kawasan andalan. Kawasan andalan Kabupaten Kepulauan Meranti adalah: Pulau tebing Tinggi, Pulau Rangsang, Pulau Merbau, dan Pulau Padang. Berdasarkan informasi dan hasil kajian di lapangan, di daerah yang berpotensi dikembangkan pusat pertumbuhan. Perspektif Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Di Kabupaten Kepulauan Meranti

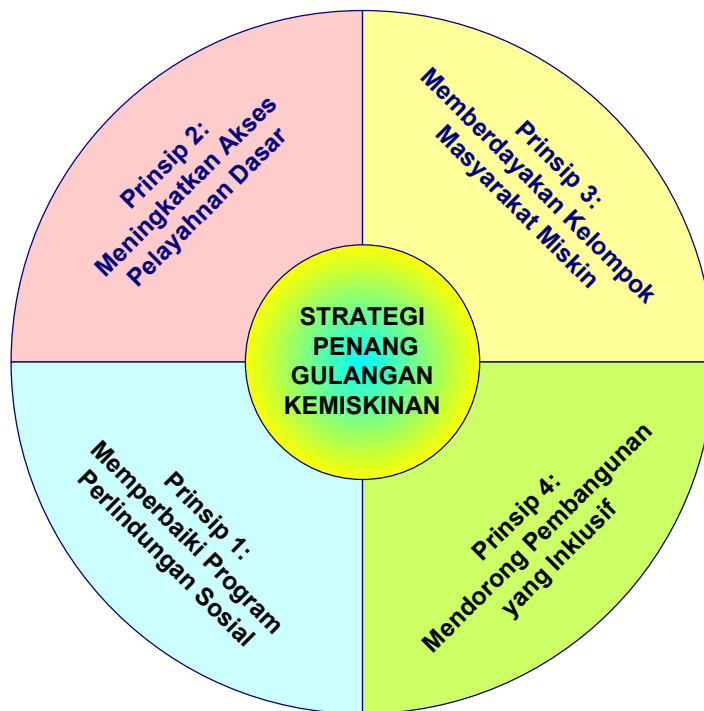
- Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Selatpanjang dan Ransang
- Pengembangan Cluster Industri berbasis Pertanian.
- Pengembangan Kawasan Pelabuhan dan Industri Dorak
- Pengembangan Kawasan Industri Tebing tinggi Barat
- Pengembangan Kawasan indsutri Pulau Ransang
- Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah dalam Rangka Ketahanan Pangan Operasi Pangan Riau Makmur

- Pengembangan Perikanan, penangkapan ikan dan budidaya ikan khususnya Patin Jambal dan Pertambakan udang
- Pengembangan Bidang Peternakan khususnya Ternak Sapi, kambing , dan itik
- Revitalisasi Perkebunan Karet, Kelapa, Sagu, Kopi dan Kakao

2. Prinsip Utama Penanggulangan Kemiskinan Yang Komprehensif

Kriteria keberhasilan pembangunan adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang berarti adanya penurunan jumlah keluarga miskin. Penurunan jumlah keluarga miskin ini merupakan faktor terpenting, oleh karena itu selalu diupayakan dengan berbagai strategi kebijakan khusus melalui lintas instansi dan lintas program. Upaya penurunan banyaknya keluarga miskin diarahkan melalui pendekatan pemberdayaan dan perbaikan sektor ekonomi dengan pemberian pelatihan keterampilan, peningkatan akses ke sumber daya, dan bantuan modal usaha produktif.

Kemiskinan di daerah terbentuk pada umumnya karena alasan klasik, yakni kekurangan modal usaha, lemahnya sumberdaya manusia, kurangnya akses pasar, infrastruktur yang tidak sempurna, lemahnya informasi, lemahnya kemampuan memanfaatkan peluang usaha. Dari sisi lain juga lemahnya pelayanan sosial untuk masyarakat terutama kesehatan dan pendidikan. Guna mengatasi masalah tersebut maka dilakukan penanggulangan kemiskinan dipedesaan. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi jumlah keluarga miskin. Strategi yang dimaksud antara lain: 1) memperbaiki program perlindungan sosial, terutama kesesahatan, pendidikan, kelembagaan ekonomi dan nonekonomi di pedesaan; 2) meningkatkan akses pelayan dasar seperti pelayanan kesehatan, pendidikan bagi anak usia sekolah, mengurangi tingkat anak putus sekolah, memberikan harga yang layak terhadap kebutuhan pokok masyarakat miskin; 3) pemberdayaan kelompok masyarakat miskin melalui pemberian modal usaha, membuka peluang kerja dan usaha; 4) mendorong pembangunan yang inklusif di daerah pedesaan (TNP2K, 2012). Pada Gambar 4 disajikan strategi penurunan keluarga miskin di Kabupaten Kepulauan Meranti.



Gambar 4. Strategi Penurunan Jumlah Keluarga Miskin (TNP2K, 2012, telah dimodifikasi).

Prinsip pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi guncangan-guncangan (*shocks*) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana atau bencana alam, dan sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami guncangan tidak sampai jatuh miskin.

Penerapan strategi ini antara lain didasari satu fakta besarnya jumlah masyarakat yang rentan jatuh dalam kemiskinan di Indonesia. Di samping menghadapi masalah tingginya potensi kerawanan sosial, Indonesia juga dihadapkan pada fenomena terjadinya populasi penduduk tua (*population ageing*) pada struktur demografinya. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan beban ekonomi terhadap generasi muda untuk menanggung mereka atau tingginya rasio ketergantungan.

Tingginya tingkat kerentanan juga menyebabkan tingginya kemungkinan untuk masuk atau keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menanggulangi semakin besarnya kemungkinan orang jatuh miskin, perlu dilaksanakan suatu program bantuan sosial untuk melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak menjadi miskin dan mereka yang sudah miskin agar tidak menjadi lebih miskin.

Prinsip kedua dalam penanggulangan kemiskinan adalah memperbaiki akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Disisi lain peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia (*human capital*).

Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar penduduk miskin terpenting adalah peningkatan akses pendidikan. Pendidikan harus diutamakan mengingat dalam jangka panjang ia merupakan cara yang efektif bagi penduduk miskin



untuk keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, kesenjangan pelayanan pendidikan antara penduduk miskin dan tidak miskin akan melestarikan kemiskinan melalui pewarisan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat mencapai tingkat pendidikan yang mencukupi sangat besar kemungkinannya untuk tetap miskin sepanjang hidupnya.

Selain pendidikan, perbaikan akses yang juga harus diperhatikan adalah akses terhadap pelayanan kesehatan. Status kesehatan yang lebih baik, akan dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan keluar dari kemiskinan. Selain itu, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak menjadi poin utama untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Konsumsi air minum yang tidak layak dan

buruknya sanitasi perumahan meningkatkan kerentanan individu dan kelompok masyarakat terhadap penyakit.

Prinsip ketiga adalah upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan.

Pentingnya pelaksana strategi dengan prinsip ini menimbang kemiskinan juga disebabkan oleh ketidakadilan dan struktur ekonomi yang tidak berpihak kepada kaum miskin. Hal ini menyebabkan output pertumbuhan tidak terdistribusi secara merata pada semua kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat miskin, yang secara politik, sosial, dan ekonomi tidak berdaya, tidak dapat menikmati hasil pembangunan tersebut secara proporsional. Proses pembangunan justru membuat mereka mengalami marginalisasi, baik secara fisik maupun sosial.

Konsep pembangunan yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan umumnya melalui mekanisme atas-bawah (top-down). Kelemahan dari mekanisme ini adalah tanpa penyertaan partisipasi masyarakat. Semua inisiatif program penanggulangan kemiskinan berasal dari pemerintah (pusat), demikian pula dengan penanganannya. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis implementasi program selalu dibuat seragam tanpa memperhatikan karakteristik kelompok masyarakat miskin di masing-masing daerah. Akibatnya, program yang diberikan sering tidak mempunyai korelasi dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat miskin setempat. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, upaya secara menyeluruh disertai dengan pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah satu prinsip utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan.

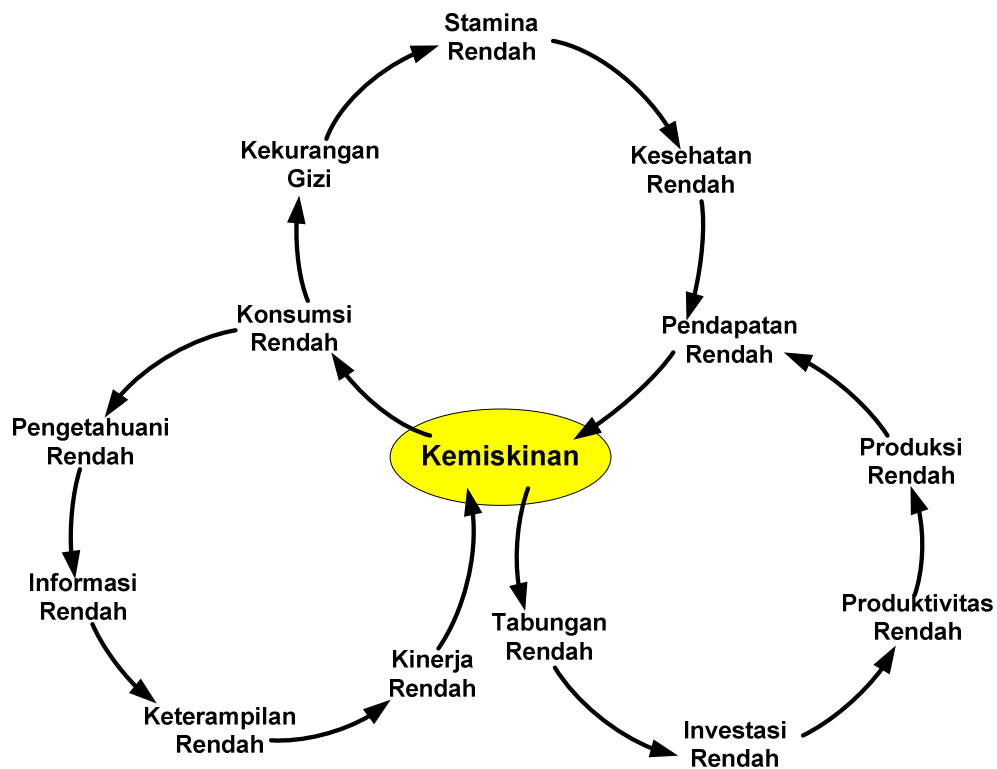
Prinsip keempat adalah Pembangunan yang inklusif yang diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Partisipasi menjadi kata kunci dari seluruh pelaksanaan pembangunan. Fakta di berbagai negara menunjukkan bahwa

kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar. Selanjutnya, diharapkan terdapat multiplier effect pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup, dan pengurangan angka kemiskinan.

Program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh pemerintah secara nasional maupun di tingkat daerah. Pemerintah telah melakukan beberapa program secara nasional maupun daerah, antara lain: 1) Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) melalui bantuan modal; 2) Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT); 3) Program dalam rangka Menanggulangi Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE); 4) P2MPD; 5) PPK; 6) Program PNPM mandiri Pedesaan; 7) P2KP; 8) Program RHI (Rumah Layak Huni); 9) Program UMKM; 10) BLT (Bantuan Langsung Tunai); 11) BOS (Bantuan Operasional Sekolah); 12) Program Raskin; 13) OPRM (Operasi Pangan Riau Makmur); 14) Program pengetaan kemiskinan, kebodohan dan pembangunan infrastruktur (K2i).

3. Lingkaran Kemiskinan di Pedesaan

Pemerintah selalu mengembangkan program penanggulangan kemiskinan baik secara daerah maupun secara nasional. Kemiskinan di daerah pedesaan maupun di perkotaan terbentuk secara berantai. Sebuah keluarga miskin akan sulit keluar dari kemiskinan tersebut disebabkan berapa hal, antara lain: keluarga miskin mempunyai kemampuan pengetahuan yang rendah dan berakibat kepada keterampilan yang rendah. Kondisi ini menyebabkan tingkat keahlian yang dimiliki juga rendah. Secara berkesinambungan mereka ini memperoleh pendapatan yang rendah pula. Begitu juga dari sisi kesehatan. Keluarga miskin mempunyai gizi yang tidak memadai dan menyebabkan stamina rendah yang berdampak terhadap produktivitas rendah. Akhirnya bermuara kepada pendapatan yang rendah dan menyebabkan mereka tetap miskin. Pada Gambar 5 disajikan terbentuknya kemiskinan dengan menyajikan bentuk-bentuk lingkaran kemiskinan di pedesaan maupun di perkotaan.



Gambar 5. Linkaran Terbentuknya Kemiskinan di Pedesaan

4. Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2011-2015: 1) Mewujudkan penataan birokrasi pemerintahan yang efisien dan efektif; 2) Menurunkan tingkat kemiskinan melalui swasembada hasil Pertanian, Perikanan dan Peternakan; 3) Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat; 4) Meningkatkan sumber daya manusia dan produktivitas masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi local; 5) Meningkatkan Infrastruktur dasar dalam rangka merangkai pulau, termasuk revitalisasi air bersih dan peningkatan elektrifikasi; 6) Mendorong investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan penciptaan nilai tambah ekonomi; 7) Meningkatkan pembinaan mental spritual dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlakul kharimah.

Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 adalah: 1) Penataan birokrasi pemerintahan agar menjadi efisien dan efektif dengan didukung peningkatan kualitas aparatur yang profesional dan bermoral; 2) Meningkatkan investasi dalam rangka menunbuhkan perekonomian, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memperbaiki tingkat pendapatan

masyarakat; 3) Menyediakan infrastruktur sosial dan ekonomi secara memadai untuk ketubuhan masyarakat dan mendukung kegiatan pembangunan; 4) Memperbaiki tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas; 5) Pengelolaan SDA secara efisien untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan; 6) Pendayagunaan sumberdaya kelautan dan pulau-pulau kecil; 7) Mewujudkan daerah perbatasan menjadi daerah layak huni, produktif dan mandiri sehingga nantinya menjadi daerah perbatasan berfungsi sebagai halaman terdepan wilayah NKRI.

5. Penanggulangan Kemiskinan: Pendekatan Lintas Sektor

Terkait dengan beberapa program yang tengah digalakkan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain dengan memfokuskan arah pembangunan untuk mencapai visi Indonesia tahun 2020 pada pengentasan kemiskinan. Fokus program tersebut meliputi 5 hal antara lain: 1) menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok; 2) mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin; 3) menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat; 4) meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar; dan 5) membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Dari 5 fokus program pemerintah tersebut, diharapkan jumlah rakyat miskin yang ada dapat tertanggulangi sedikit demi sedikit.

Beberapa langkah teknis yang digalakkan pemerintah terkait 5 program tersebut antara lain (Kompasiana, 2012):

a. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok.

Fokus program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras. Program yang berkaitan dengan fokus ini seperti: 1) Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton; 2) Stabilisasi/kepastian harga komoditas primer.

b. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin.

Fokus program ini bertujuan mendorong terciptanya dan terfasilitasinya kesempatan berusaha yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat/

keluarga miskin. Beberapa program yang berkenaan dengan fokus ini antara lain: 1) Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional; 2) Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP); 3) Pelatihan budaya, motivasi usaha dan teknis manajemen usaha mikro; 4) Pembinaan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal; 5) Fasilitasi sarana dan prasarana usaha mikro; 6) Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir; 7) Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil; 8) Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga; 9) Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah; 10) Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.

- a. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin. Program yang berkaitan dengan fokus ketiga ini antara lain: 1) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan dan perkotaan; 2) Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah; 3) Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus; 4) Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat.

- d. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar.

Fokus program ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar. Beberapa program yang berkaitan dengan fokus ini antara lain: 1) Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs); 2) Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA); 3) Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa

berprestasi; 4) Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit

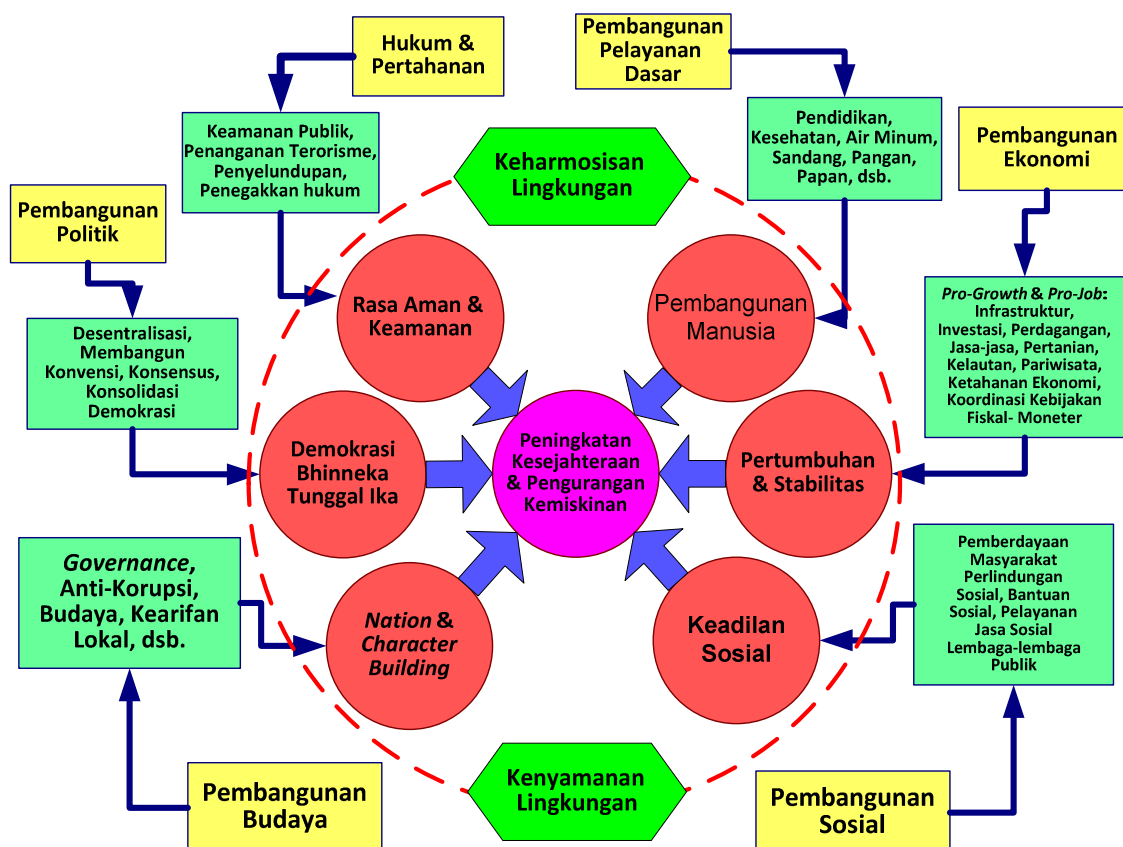
- e. Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Fokus ini bertujuan melindungi penduduk miskin dari kemungkinan ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi. Program teknis yang di buat oleh pemerintah seperti : 1) Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA); 2) Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya; 3) Bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam, dan korban bencana social; 4) Penyediaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan (pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi dan pemeriksaan rutin BALITA, menjamin keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs; dan penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin/RTSM) melalui perluasan Program Keluarga Harapan (PKH); 5) Pendataan pelaksanaan PKH (bantuan tunai bagi RTSM yang memenuhi persyaratan).

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang di hadapi oleh seluruh pemerintahan yang ada di dunia ini. Kemiskinan di pengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Faktor tersebut antara lain tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Oleh karena itu, kemiskinan wajib untuk ditanggulangi, sebab jika tidak tertanggulangi akan dapat mengganggu pembangunan nasional. Dalam konteks ini, beberapa upaya yang tengah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan menggerakkan sektor real melalui sektor UMKM. Beberapa kebijakan yang menyangkut sektor ini seperti program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Upaya strategis yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan UMKM antara lain, pertama, menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan UMKM meliputi regulasi dan perlindungan usaha.

Kedua menciptakan sistem penjaminan bagi usaha mikro. Ketiga menyediakan bantuan teknis berupa pendampingan dan bantuan menejerial. Keempat memperbesar akses perkreditan pada lembaga keuangan. Dengan empat langkah tersebut, maka sektor UMKM akan lebih bergerak yang pada akhirnya akan berakibat pada pengurangan angka kemiskinan. kemiskinan akan makin bertambah seiring tidak terjadinya pemerataan pembangunan (Kompasiana, 2012).

Terkait dengan penanggulangi penurunan jumlah keluarga miskin, pada Gambar 6 disajikan model penurunan jumlah keluarga miskin melalui pendekatan lintas sektoral.



Gambar 6. Model Penurunan Jumlah Keluarga Miskin Melalui Pendekatan Lintas Sektoral (TNP2K, 2012, telah dimodifikasi)

Pelaksanaan program tersebut seharusnya melibatkan semua komponen, antara lain: pemerintah pusat dan daerah, piha swasta, dan perguruan tinggi. Program penanggulangi kemiskinan bukan berarti menghabiskan orang miskin, melainkan program tersebut harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar

keluarga miskin tersebut. Bagi keluarga miskin kebutuhan dasar terpenuhi dan kebutuhan pokok tidak memberatkan beban keluarga, maka kesejahteraan mereka akan meningkat. Untuk itu program penanggulangan kemiskinan harus berupaya untuk menciptakan lapangan kerja dan usaha sebagai sumber pendapatan bagi keluarga miskin. Secara umum keluarga miskin memang sulit untuk ditingkatkan kesejahteraannya, hal tersebut terkait dengan kepemilikan faktor produksi seperti tidak punya lahan sebagai tempat berusaha, kekurangan modal untuk mengembangkan usaha, tidak punya keahlian dalam berusaha, dan keluarga miskin hanya memiliki sumberdaya manusia yang kualitasnya rendah atau hanya sebatas tenaga kerja tidak terdidik.

Pustaka Acuan

- Almasdi Syahza., 2004. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Melalui Pengembangan Industri Hilir Berbasis Kelapa Sawit di Daerah Riau*, Disertasi Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Almasdi Syahza., 2005a. Dampak Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Multiplier Effect Ekonomi Pedesaan di Daerah Riau, dalam *Jurnal Ekonomi*, Th. X/03/November/2005, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.
- Almasdi Syahza., 2007a. *Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Berbasis Agribisnis di Daerah Riau*, Penelitian Fundamental DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Almasdi Syahza., 2007b. Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan dengan Model Agroestate Berbasis Kelapa Sawit, dalam *Jurnal Ekonomi*, Th.XII/02/Juli/2007, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.
- Almasdi Syahza., 2008. *Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Melalui Pemberdayaan Koperasi Berbasis Agribisnis Di Daerah Riau*, Penelitian Fundamental DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Almasdi Syahza., 2009. *Kelapa Sawit, Dampaknya Terhadap Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Di Daerah Riau*, Penelitian Hibah Kompetensi (tahun Pertama) DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Almasdi Syahza., 2011. *Model Pengembangan Daerah Tertinggal dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan di Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau (Tahun I)*, Lembaga Penelitian Universitas Riau, Pekanbaru.

- Gregorius Sahdan., 2005, *Menanggulangi Kemiskinan Desa*, http://www.ekonomirakyat.org/edisi_22/, diakses 6 Desember 2011
- Haryono Suyono. 2007. *Gerakan Nasional Pemberdayaan Masyarakat*. (Online). <http://www.hupelita.com/baca.php?id=27511>, diakses pada 31 Juli 2007.
- Ken Yunita, 2006., *45% Desa di Indonesia Masuk Kategori Desa Tertinggal*, <http://m.detik.com>, diakses 23 Januari 2010.
- Kompasiana, 2012., *Upaya Pemerintah Mengatasi Masalah Kemiskinan*, <http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/>, diakses 18 Oktober 2012.
- Lukman Edy, 2008., *28 Desa Tertinggal Dapat Penghargaan Presiden RI*, <http://ads2.kompas.com/layer/kpdt/index.php/news>, diakses 23 Januari 2010.
- Lukman Edy, 2009., *Tersedia Rp 171 Triliun untuk 32 Ribu Desa Tertinggal*, <http://www.endonesia.com>, diakses 23 Januari 2010.
- Muhammad Basri, 2007., *Desa dan Kemiskinannya*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0703/30/Jabar/11719.htm>, diakses 31 Juli 2007.
- Muhammad Kholikul Alim, 2007, *Negara Vs. Kemiskinan Di Pedesaan*, http://uploadoverload.blogs.friendster.com/my_blog/2007/07/negara_vs_kemis.html, 10 Agustus 2007.
- Mudrajad Kuncoro., 2000. *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Mudrajad Kuncoro., 2002. *Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, 2011., *Data statistik Otonomi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti*, Pemda kabupaten Kepulauan Meranti, Selat Panjang.
- Pemberdayaan.com., 2009a, *Konsep Pemberdayaan, Membantu Masyarakat Agar Bisa Menolong Diri Sendiri*, <http://www.pemberdayaan.com/>, diakses 4 April 2012.
- Pemberdayaan.com., 2009b, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan*, <http://www.pemberdayaan.com/pembangunan>, diakses 6 Desember 2011
- Richardson, 2001., *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional*, terjemahan Paul Sitohang, FE-UI, Jakarta.
- Rusli Zainal, 2010., *Menciptakan Kabupaten Kepulauan Meranti Sebagai Hiterland Free Trade Zone Batam*, Makalah pada seminar: *Peluang dan Tantangan Kabupaten Meranti dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Balitbangda Propinsi Riau, Pekanbaru.
- Syamsuar, 2010., *Harapan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Makalah pada seminar: *Peluang dan Tantangan Kabupaten Meranti dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Balitbangda Propinsi Riau, Pekanbaru.

- TNP2K, 2012., *Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), <http://tnp2k.go.id/>, diakses 18 Oktober 2012.
- Tulus T.H. Tambunan., 2001. *Transformasi Ekonomi di Indonesia Teori dan Penemuan Empiris*, Salemba Empat, Jakarta.
- Yuswar Zainal Basri., 2003, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan, dalam *Usahawan Indonesia* No 03/TH.XXXII Maret 2003, Lembaga Manajemen FE-UI, Jakarta.

Ucapan Terimakasih

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada DP2M Dikti Jakarta melalui Lembaga Penelitian Universitas Riau yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti melalui penyediaan dana Hibah Penelitian Fundamental tahun anggaran 2012. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya ekonomi pedesaan.